

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, menggalakan pembangunan nasional secara *intensive* merupakan kunci utama bagi Indonesia agar mampu bertahan dalam menghadapi sengitnya persaingan global yang ada. Salah satu penopang utama dalam pembangunan nasional adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Zarkasyi (2008:2), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional dimana hampir setiap warga negara membutuhkan hasil produksi dari BUMN, dengan keanekaragaman sektor yang dimilikinya.

Untuk menjalankan misi dan perannya, kepekaan BUMN terhadap setiap perkembangan atau perubahan atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia usaha menjadi sangat penting agar profesionalisme BUMN disegala bidang dapat terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan, maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Audit internal yang dijalankan oleh Satuan pengawas intern (SPI) merupakan salah satu alat penting bagi BUMN dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan sehingga menunjang profesionalisme perusahaan.

Pentingnya peran Satuan Pengawasan Internal (auditor internal) sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No 19 tahun 2003 Tentang BUMN. Dalam

undang-undang tersebut tercantum bahwa setiap BUMN diwajibkan untuk membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai fungsi audit internal perusahaan, dimana SPI tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan internal atas operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian yang ada serta pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan, memberikan saran-saran atas perbaikannya, dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. Zarkasyi (2008:14) dalam bukunya menyatakan bahwa Konorsium Organisasi Profesi Audit Internal Indonesia (KOPAI) berkeyakinan bahwa fungsi audit internal yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian.

Sebagian besar BUMN saat ini telah beralih ke dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana kepemilikan satuan usahanya terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal (*investor*). *Investor* tersebut akan berkumpul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menunjuk dewan komisaris yang akan bertanggung jawab secara langsung dalam memantau kinerja perusahaan. Dewan komisaris umumnya terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda. Dengan sebagian besar kewenangan RUPS dilimpahkan kepada dewan komisaris, maka kecil kemungkinan segalanya dapat dipikirkan dan ditangani sendiri oleh dewan komisaris. Untuk itu diperlukan adanya suatu unit independen yang dinamakan Komite Audit (Purwati, 2006:2).

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memerlukan adanya komunikasi yang baik dengan auditor internal maupun auditor eksternal. Komite Audit memiliki fungsi sebagai mediator antara auditor eksternal, manajemen, auditor internal, dan

dewan komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Mengingat bahwa sebagian besar modal kepemilikan BUMN didanai oleh negara, baik peran auditor internal maupun Komite Audit keduanya menjadi penting dalam rangka memantau dan menjaga efektivitas pengendalian internal yang ada sehingga mampu memberikan jaminan terhadap kinerja dan menciptakan nilai BUMN. Peran Komite Audit sebagai alat bantu monitoring oleh dewan komisaris sebenarnya tidak dapat lepas dari peran auditor internal mengingat keduanya sama-sama berperan dalam mengawasi kinerja manajemen, meskipun auditor internal sendiri sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap dewan direksi.

Kalbers & Fogarty (1993) (dalam Effendy, 2005:55) mengemukakan bahwa adanya komunikasi yang lancar antara Komite Audit dengan auditor internal dapat menunjukkan eksistensi Komite Audit yang lebih efektif dan dapat meringankan tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, Zarkasyi (2008) melakukan analisis empirik atas peran Komite Audit dan audit internal terhadap mekanisme *Good Corporate Governance* serta dampaknya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara. Penelitian tersebut dilaksanakan berdasarkan dokumentasi kinerja BUMN selama tahun 2006 yang diperoleh dari Kementerian BUMN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Komite Audit dan auditor internal, baik secara simultan maupun secara parsial keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMN dimana semakin kuat interaksi antara Komite Audit dengan Auditor Internal maka akan semakin besar dukungannya terhadap pencapaian kinerja BUMN (Zarkasyi, 2008:178-184).

Secara garis besar, meskipun berpotensi terjadi konflik kepentingan akibat keduanya berada dibawah naungan yang memiliki kepentingan berbeda, namun audit internal dan Komite Audit sama-sama memiliki fungsi *assurance* terhadap kualitas kinerja dan kepatuhan para personil dalam manajemen atas prosedur dan regulasi yang berlaku. Karena itu, peneliti tertarik untuk menguji apakah peran Komite Audit dapat membuat kinerja auditor internal menjadi lebih memadai. Peneliti akan melakukan studi kasus terhadap salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan singkatan PT. SUCOFINDO (Persero) yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 12780 Jakarta Selatan, melalui skripsi yang berjudul: **“PENGARUH KOMITE AUDIT DALAM MENUNJANG KINERJA UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) YANG MEMADAI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komite Audit pada PT. SUCOFINDO (Persero) dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
2. Bagaimana Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT. SUCOFINDO (Persero) dalam menjalankan fungsi audit internal.
3. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit dalam menunjang kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang memadai pada PT. SUCOFINDO (Persero).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi atas permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Komite Audit pada PT. SUCOFINDO (Persero) menjalankan fungsi dan tanggung jawab terhadap Dewan Komisaris,
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT. SUCOFINDO (Persero) dalam rangka membantu Dewan Direksi melakukan pengawasan internal.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. SUCOFINDO (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diolah sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul. Maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Akademis:
 - Bagi perkembangan ilmu akuntansi, memberikan referensi tentang peran dan hubungan Komite Audit dengan kinerja auditor internal dalam sebuah perusahaan.
 - Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan keilmuan dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

- Bagi peneliti, dalam upaya lebih memahami bagaimana peran Komite Audit dalam meningkatkan kinerja auditor internal dalam sebuah perusahaan.

2. Bagi Praktisi Bisnis:

- Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan khususnya terhadap Komite Audit dan auditor internal dalam sebuah perusahaan terkait peran dan tanggung jawab masing-masing, serta bagaimana keduanya dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui pengendalian internal yang efektif dan terlaksana dengan baik.